

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Fiskal

1. Pengertian

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Wayan Sudirman, 2011: 2).

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2018: 152).

Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang di tingkat

provinsi lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004: 94).

PAD dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu

a. Pajak daerah

- Pajak Provinsi
- Pajak Kabupaten/Kota

b. Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi Nordiawan, 2008: 56).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengidentifikasi bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004: 30).

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Mardiasmo (2002: 142) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah

pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah yaitu: (1) untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. (Kuncoro, 2004: 34).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan lain-lain.

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi

masalah-masalah khusus. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana pendamping paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana pendamping ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

d. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaranyang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Nurlan Darise, 2009: 131).

Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Abdul Halim, 2004: 73)

Besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan ketentuan perundang-undangan.

B. *Gross Domestic Product (GDP)*

Terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk dalam suatu negara. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Gross Domestic Product (GDP).

Pengertian dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Namun, dalam GDP terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, GDP per kapita yang merupakan besarnya GDP apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan

alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw,2006: 5,6,22,23).

Untuk menghitung GDP digunakan rumus :

$$GDP = C + I + G + Xn \quad (1.1)$$

Dimana :

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

Xn = Net ekspor (ekspor dikurangi impor)

C. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap GDP

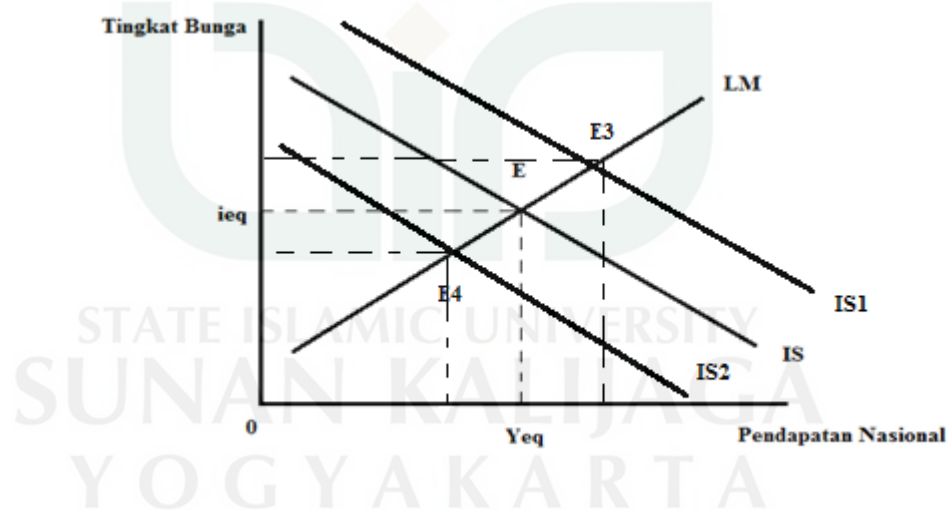
Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah (Soeratan, 2016: 76). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontratif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan

pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak (Soeratno, 2016: 210).

Akibat adanya kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif maka keadaan keseimbangan pasar barang dan jasa mengalami perubahan. Perubahan ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva IS ke kanan atau ke kiri bawah. Kurva IS mengalami pergeseran ke kanan atas apabila dilakukan kebijakan ekspansif dan mengalami pergeseran ke kiri bawah apabila dilakukan kebijakan kontraktif. Perhatikan gambar 1.1 berikut.

Gambar 2.2

Keseimbangan Pendapatan Nasional Kurva IS-LM



Sumber: Buku Pengantar Ekonomi Makro, 2016

Jika pemerintah melakukan kebijakan ekspansif maka kurva IS akan mengalami pergeseran ke kanan atas menjadi IS1. Pergeseran ini

mengakibatkan titik keseimbangan IS-LM berpindah dari titik E menjadi titik E3. Sebaliknya jika dilakukan kebijakan kontraktif maka kurva IS akan bergeser menjadi IS2 dan titik keseimbangan akan berpindah ke titik E4.

D. Kebijakan Fiskal Menurut Pandangan Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebuah sarana untuk mencapai maqosid syariah. Maqosid syariah menurut Imam Ghazali adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Ahmad Ifham, 2010: 491).

Metwally (1996) dikutip oleh Nurul Huda menyatakan kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang (Nurul Huda, 2015: 64).

Jika melihat praktik kebijakan fiskal yang pernah dilakukan pada masa Khulafurrasyidin maka kebijakan fiskal dalam ekonomi islam memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional terkait penerimaan dan pengeluaran negara.

a. Kebijakan Penerimaan

Sumber-sumber penerimaan negara dalam ekonomi Islam yaitu :

1. Zakat

Zakat dalam Islam dipungut dari harta yang bersih sesuai dengan syariat Islam baik yang kemudian dialokasikan kepada yang berhak menerimanya .

2. Ushr

Ushr adalah biaya impor yang dikenakan kepada seluruh pedagang.

3. Wakaf

Wakaf adalah harta benda yang diberikan oleh orang Islam dengan niat mengharap ridha Allah Swt.

4. Kharaj

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

5. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang diperoleh dalam peperangan atau bisa disebut juga rampasan perang.

6. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan atas kaum non-muslim yang tinggal dalam wilayah Negara Islam sebagai bentuk jaminan melindungi kehidupan mereka.

b. Kebijakan Pengeluaran

Kebijakan pengeluaran dalam Islam hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Qurán dan Sunnah. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat diatas untuk pengeluaran yang berasal dari dana zakat Allah Swt telah memberikan ketentuan kepada siapa saja yang berhak menerimanya yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fī sabilillah, ibnu sabil*.

Menurut Havis Aravik (2017:98) ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:

1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat
2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan lebih diutamakan dari pada penyediaan rasa tentram.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan dari kerugian publik

¹ Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS : At-Taubah : 60)

5. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
6. Tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

E. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang membahas tentang bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap produktifitas PDRB. Dari penelitian-penelitian tersebut peneliti dapat mempelajarinya untuk kemudian dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

Penelitian Sejenis

No	Penulis	Judul	Variabel	Ringkasan Hasil
1	Windha Amiga Permanasari	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	DAU, DAK, PAD, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sedangkan DAK dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan
2	Meilita Lukitasari A, Sutomo W. P, dan Jacline I. Sumual	Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	DAU, DAK, PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah	DAU, DAK dan PAD berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan

		(Kota Manado Tahun 2001-2013)	Kemiskinan	ekonomi, PAD, DAU dan DAK, secara bersama-sama memberi kontribusi yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan
3	Maria Christina Malau	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Rutin berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4	Reza Monanda Berutu	Pengaruh APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi	Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi	Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
5	Zim Roben Ompusunggu	Analisis Pengaruh Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, lain-lain pendapatan yang sah, belanja	realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan transfer, realisasi lain-lain

			daerah dan pertumbuhan ekonomi	pendapatan yang sah dan realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara simultan maupun secara parsial
6	Dedy Rahmatullah	Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan	PAD, DAU, belanja daerah, dan pertumbuhan ekonomi	PAD dan DAU berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
7	Indra Susila dkk	Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera	Belanja Rutin, Belanja Pembangunan, Investasi dan pertumbuhan ekonomi	variabel Belanja Rutin secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

		Barat		Provinsi Sumatera Barat, variabel Belanja Pembangunan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, dan variabel Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
8	Debby Ch. Rotinsulu dkk	Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara	APBD, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, pengangguran	APBD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.
9	Deviani	Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan	Ratio belanja, ratio belanja modal, ratio	ratio belanja terhadap PDRB, dan ratio

		Ekonomi Dan Pendidikan	pertumbuhan belanja, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan	pertumbuhan Belanja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ratio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
10	Dirgahayu Lerengkum dkk	Pengaruh APBD terhadap PDRB Kabupaten Talaud	Belanja operasi, Belanja modal, transfer, PAD, PDRB	Realisasi belanja APBD berpengaruh positif terhadap PDRB riil.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun persamaannya terletak pada topik penelitian. Sedangkan perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan periode penelitian. Objek penelitian ini adalah produktifitas PDRB seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Rentan waktu penelitian ini adalah dari tahun 2010-2016. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda data panel.

F. Model Penelitian

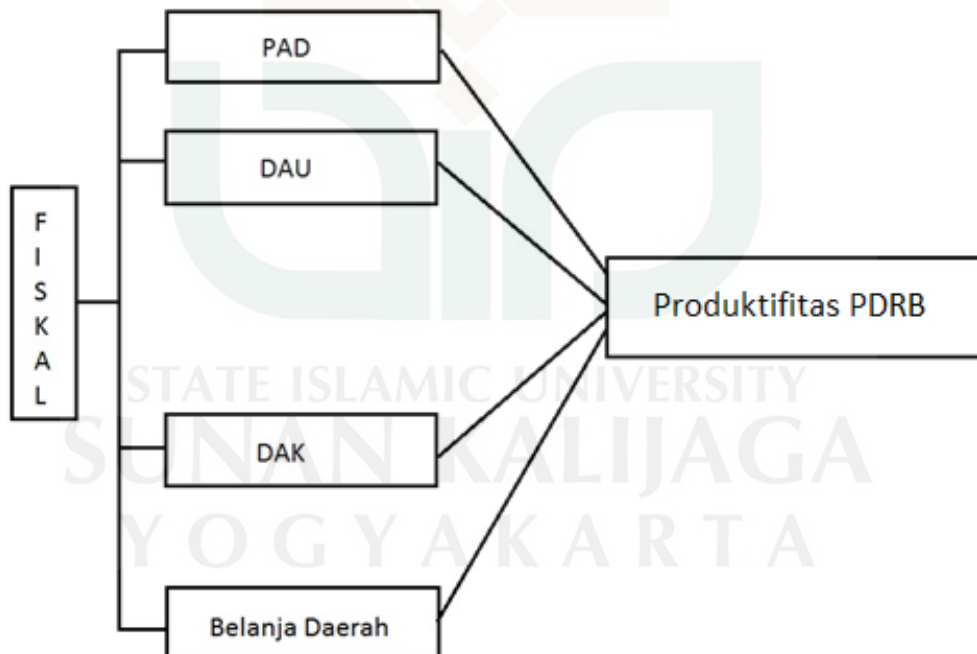
Model Penelitian atau kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan adanya hubungan yang terjadi antara variabel kebijakan fiskal dengan produktifitas PDRB.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar.1 berikut ini :

Gambar 2.2

Model Penelitian Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Produktifitas PDRB

Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera



G. Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis

Peneliti mengasumsikan bahwa masing-masing instrumen kebijakan fiskal berpengaruh terhadap produktifitas PDRB.

- a. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap produktifitas PDRB.

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam kebijakan fiskal. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Yunita Anggraini dan Hendra Puranta, 2010: 129).

Yeni Nur'ani dan Suratno (2015) dalam penelitian ditemukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB.

Berkenaan dengan hal ini maka dibuat hipotesis:

Ha1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap produktifitas PDRB.

- b. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap produktifitas PDRB.

DAU sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemda. Tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU

kepada pemerintah daerah yaitu: (1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah, (2) Untuk meningkatkan akuntabilitas, (3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif, dan (4) Untuk meningkatkan keberterimaan pajak daerah (Mardiasmo, 2002: 142).

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Nur'ani dan Suratno (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap PDRB.

Berkenaan dengan hal ini maka dibuat hipotesis:

Ha2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Produktifitas PDRB

c. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap produktifitas PDRB.

DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (Halim, 2004: 65). Berdasarkan Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Berkenaan dengan hal ini maka dibuat hipotesis:

Ha3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap produktifitas PDRB.

d. Hubungan Belanja Daerah terhadap produktifitas PDRB.

Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana (Abdul Halim, 2004: 73)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirgahayu Lerengkum realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat produktifitas PDRB.

Berkenaan dengan hal ini maka dibuat hipotesis:

Ha4: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap produktifitas PDRB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi (Mudrajat Kuncoro, 2004: 3).

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengaruh kebijakan fiskal terhadap produktifitas PDRB. Kebijakan fiskal diwakili oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber antara lain Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR), Laporan Realisasi Anggaran Provinsi, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

B. Variabel Penelitian

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. PDRB, yaitu Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam suatu daerah

tertentu pada suatu periode. Adapun persamaan dari PDRB adalah sebagai berikut:

$$PDRB = C + I + G + Xn \quad 1.2$$

dimana :

Dimana :

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

Xn = Net ekspor (ekspor dikurangi impor)

- b. Pendapatan asli daerah (PAD) provinsi di pulau Sumatera, yaitu semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang diukur dalam satuan miliar rupiah.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) provinsi di pulau Sumatera, yaitu merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat yang diukur dalam satuan juta rupiah.
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi di pulau Sumatera dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- e. Belanja daerah yaitu seluruh pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Ma'ruf, 2006: 19)

C. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan produktifitas PDRB, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja daerah. Analisis deskriptif dilakukan dengan membaca tabel dan grafik untuk melihat kecenderungan dari perkembangan data-data komponen atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini

Metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan cara menguji secara statistik terhadap variabel-variabel yang telah dikumpulkan dengan menggunakan program eViews.

Data panel merupakan kombinasi data cross section dengan time series (Kuncoro, 2004: 45). Jika setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai balanced panel (total jumlah observasi = $N \times T$). Sebaliknya jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit *cross section* maka disebut unbalanced panel.

Keunggulan menggunakan data panel jika di bandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah:

- a. Dapat memberikan penelitian jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degrees of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabelitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variable penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang sesuai.
- b. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section dan time series saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section* (Aryogo, 2014: 64).

Adapun model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} \quad 1.3$$

dimana :

Y = produktifitas PDRB

B_0 = konstanta

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Belanja daerah

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = koefisien regresi masing-masing variabel

e = *error*

i = waktu

t = *crosssection*

Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

D. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Data panel akan menghasilkan intersep dan slop koefisien yang berbeda pada setiap individu (dalam hal ini setiap provinsi) dan setiap periode waktu.

Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaannya akan sangat tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slop, dan variabel pengganggu. Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu:

a. Model Estimasi *Common Effect*

Model regresi *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Dikatakan paling sederhana karena hanya menggabungkan data *cross section* dan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS).

b. Model Estimasi *Fixed Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model ini sering juga disebut *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

c. Model *Random Effect*

Pendekatan yang dipakai dalam *Random Effect* mengasumsikan setiap individu mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel

adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. Model ini juga sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).

E. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah *Common Effect* ataukah *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Jika nilai probabilitas atau p-value kurang dari taraf signifikan 5% (0,05) maka model yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya.

b. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Jika nilai p-value kurang dari 0.05 maka model yang lebih baik digunakan adalah *fixed effect*.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Lagrange Multiplier digunakan untuk membandingkan mana yang lebih baik digunakan antara *common effect* dengan *random effect*. Jika nilai p-value lebih kecil dari pada 0,05 maka model yang digunakan adalah *random effect*.

F. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah berpengaruh maka dilakukan perbandingan F hitung dengan F tabel. Jika nilai f hitung lebih besar dari pada nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T adalah pengujian satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel yang lain konstan atau tetap. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak maka dilakukan perbandingan T hitung dengan T tabel. Jika t hitung besar dari t tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai tersebut menjelaskan seberapa dekat garis regresi yang kita estimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R^2 dari 0 sampai 1 dimana semakin mendekati 1 maka model semakin baik (Supranto, 2015 :77).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pulau Sumatera

Sumatera adalah pulau yang luas di Hindia Timur dan pulau paling barat dari Kepulauan Melayu. Garis khatulistiwa membagi miring Pulau Sumatera. Oleh karena pembagiannya berdasarkan arah barat laut dan tenggara menjadi dua bagian yang hampir sama, yang satu berujung di 5035' LU dan yang lainnya pada garis 5056' LS. Dalam posisi relatif, ujung paling utama merentang sampai ke Teluk Benggala, sedangkan pantai barat dayanya terletak di Lautan Hindia. Pada bagian selatan, Pulau Sumatera dipisahkan dengan Pulau Jawa oleh Selat Sunda. Pada bagian sebelah timur, Pulau Sumatera dipisahkan dengan pulau-pulau lain oleh permulaan Laut Timur dan Laut Cina dari Kalimantan. Disebelah timur laut Pulau Sumatera dari Semenanjung Melayu oleh Selat Malaka (Marsden, 1999: 1).

Bumi Sumatera kaya akan mineral dan bahan-bahan tambang. Tak ada negeri lain yang lebih dikenal karena persediaan emas yang melimpah di sepanjang masa. Akan tetapi, sumber-sumber asalnya dalam batas-batas tertentu sudah habis karena di eksploitasi selama berabad-abad. Walaupun begitu, kuantitas yang didapat hari ini masih cukup banyak, bahkan akan jauh

bertambah andaikan cara-cara pengumpulannya dilakukan dengan pengetahuan teknik minerologi. Selain itu, ada juga tambang tembaga, besi, dan timah (Marsden, 1999: 20).

B. Analisis Data Penelitian

Pada Bab ini akan dibahas tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan fiskal yang diwakili oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

Untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan maka akan digunakan statistik deskriptif. Tabel dibawah ini menunjukkan statistik deskriptif atas variabel-variabel yang ada pada pemodelan panel data pada penelitian skripsi ini.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

Ket	PAD	DAU	DAK	Belanja	PDRB
Mean	1744541948393.61	841020901277.04	162360439080.43	4163522576903.81	181548339119714
Median	1221795545877.33	845612945000.00	48775244000.00	3498416556043.91	131920234265000
Max	5223940074318.61	1604505673000.00	3103684863000.00	10365191937744.40	467813216250000
Min	267241983243.03	58869157000.00	4558900000.00	110819733621.46	23374686600000
Std.dev	1291743672971.05	291466285222.38	462155808614.30	2603503961460.00	133738810621002

Sumber: Lampiran 2

Dari tabel 4.1 di atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai tertinggi dan terendah sebesar 5.223.940.074.318,61 dan 267.241.983.243,03. Nilai rata-rata sebesar 1.744.541.948.393,61 sedangkan untuk nilai standar deviasinya adalah sebesar 1.291.743.672.971,05.

Nilai tertinggi dan terendah variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 1.604.505.673.000,00 dan 58.869.157.000,00. Nilai rata-rata sebesar 841.020.901.277,04 dan standar deviasi sebesar 291.466.285.222,38.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai tertinggi dan terendah sebesar 3.103.684.863.000 dan 4.558.900.000. Sedangkan nilai rata-rata dan standar deviasinya masing-masing adalah sebesar 162.360.439.080,43 dan 462.155.808.614,30.

Variabel belanja daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 4.163.522.576.903,81. Nilai standar deviasinya sebesar 2.603.503.961.460. Sedangkan nilai tertinggi dan terendahnya adalah 10.365.191.937.744,40 dan 110.819.733.621,46.

Kemudian variabel independen produktifitas PDRB memiliki rata-rata sebesar Rp. 181.548.339.119.714,-. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 133.738.810.621.002,-. Nilai tertinggi dan terendah sebesar Rp. 467.813.216.250.000,- dan Rp. 23.374.686.600.000,-.

C. Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel disebut dengan regresi data panel. Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *common*, *fixed effect*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai oleh peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, Sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga model yang tersedia.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan mana yang lebih baik digunakan antara model *fixed effect* dengan *common effect*. Jika nilai probabilitas F stat lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ maka akan menghasilkan kesimpulan bahwa model *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dan jika nilai probabilitas F stat lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka disimpulkan model *common effect* yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$H_0 = \text{Model } common \text{ effect}$$

$$H_1 = \text{Model } fixed \text{ effect}$$

Tabel 4.2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	121.953496	(9,56)	0.0000
Cross-section Chi-square	211.769251	9	0.0000

Sumber : Lampiran 3

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil uji Chow atau likelihood nilai p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari pada 0,05. Oleh karena itu H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah suatu model statistik penelitian lebih tepat menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*. Jika nilai probabilitas F stat lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ maka akan menghasilkan kesimpulan bahwa model *fixed effect* yang lebih tepat digunakan sedangkan jika nilai F stat lebih besar dari $\alpha = 0.05$ maka model *random effect* lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah :

$$H_0 = \text{Model } \textit{random effect}$$

$$H_1 = \text{Model } \textit{fixed effect}$$

Tabel 4.3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	396.368283	4	0.0000

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima karena nilai p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Artinya Model *fixed effect* lebih tepat digunakan dari pada model *random effect*.

D. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Dari hasil uji chow, uji hausman, dan *langrange multiplier* maka dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model *random effect*. Model ini mengestimasi data panel yang residual diduga memiliki hubungan kuat antar waktu dan antar subjek. Berikut ini hasil estimasi model *random effect*.

Tabel 4.5 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: PDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/09/18 Time: 22:54
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 70

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.31E+14	8.24E+12	15.94917	0.0000
PAD	-1.784526	4.199653	-0.424922	0.6725
DAU	30.39117	12.91231	2.353658	0.0221
DAK	10.15019	4.791394	2.118421	0.0386
BELANJA	6.257995	2.463896	2.539878	0.0139

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.990018	Mean dependent var	1.82E+14
Adjusted R-squared	0.987701	S.D. dependent var	1.34E+14
S.E. of regression	1.48E+13	Akaike info criterion	63.67030
Sum squared resid	1.23E+28	Schwarz criterion	64.11999
Log likelihood	-2214.460	Hannan-Quinn criter.	63.84892
F-statistic	427.2557	Durbin-Watson stat	1.026053
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Lampiran 6

Dari hasil estimasi di atas maka persamaan regresi data panel dapat disusun sebagai berikut:

$$PDRB = -1.78PAD + 30.39DAU + 10.15 DAK + 6.25Belanja + e$$

Dari persamaan regresi di atas dengan menggunakan model *Fixed effect* dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Konstanta (α)

Nilai konstanta pada regresi diatas menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja daerah bernilai nol maka produktifitas PDRB pulau Sumatera adalah sebesar 1.31.

2. Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilambangkan dengan β_1 memiliki nilai -1.78. Nilai signifikansinya sebesar 0.67 lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap produktifitas PDRB di pulau Sumatera.

3. Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

Koefisien dari Dana Alokasi Umum (DAU) dilambangkan dengan β_2 memiliki nilai 30.39 dengan nilai signifikansi sebesar 0.021 lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB di pulau Sumatera. Artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1 miliar maka akan meningkatkan produktifitas PDRB sebesar 30.39.

4. Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Koefisien dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dilambangkan dengan β_3 memiliki nilai 10.15. Nilai signifikansi sebesar 0.038. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB di pulau Sumatera.

5. Koefisien Regresi Belanja Daerah

Koefisien dari Belanja Daerah dilambangkan dengan β_4 memiliki nilai 6.25 dengan nilai signifikansi sebesar 0.013 lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap produktifitas PDRB di pulau Sumatera. Artinya setiap ada kenaikan Belanja Daerah sebesar 1 miliar maka akan terjadi penurunan produktifitas PDRB sebesar 6.25.

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikansi pengujian ini dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitasnya. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0.05 maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

Berikut hasil uji simultan atau uji:

Tabel 4.6 Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
Prob. F-Statistik	0.000000

Sumber : Lampiran 6

Dari hasil model *random effect* di atas nilai probabilitas f-statistiknya kurang dari 0,05 yaitu 0,000000 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Artinya secara keseluruhan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji T)

Uji T adalah pengujian satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel yang lain konstan atau tetap. Untuk menguji apakah setiap variabel independen berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statistik jika nilainya kurang dari 0,05 maka berpengaruh secara signifikan. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut :

H_0 : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera

H_1 : Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model *random effect* pada tabel 4.5 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera, berdasarkan hasil regresi nilai probabilitas t-statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0.6725 lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera sehingga H_0 diterima.
- b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera, berdasarkan hasil regresi nilai probabilitas t-statistik Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 0.0221 lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.
- c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera, berdasarkan hasil

regresi nilai probabilitas t-statistik Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar 0.0386. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

- d. Pengaruh Belanja Daerah terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera, berdasarkan hasil regresi nilai probabilitas t-statistik Belanja Daerah adalah sebesar 0.0139 lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

F. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti model dugaan yang diperoleh semakin akurat untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil dari koefisien determinan.

Tabel 4.7 Hasil *R-square* dan *Adjusted R-square*

Keterangan	Nilai
R-square	0.990018
Adjusted R-square	0.987701

Sumber: Lampiran 6

Nilai R^2 dari penelitian ini adalah 0,990018 atau 99.00%, artinya variabel-variabel independen pada model mampu menjelaskan variabel dependen sebanyak 99.00% dan yang lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa estimasi yang dihasilkan cukup baik untuk menjelaskan produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera. Hal ini ditunjukkan oleh variabel-variabel independen yang secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera. Namun, terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di Pulau Sumatera yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun penjelasan secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap produktifitas PDRB seluruh Provinsi di pulau Sumatera

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) diperoleh dari aktifitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang dimiliki maka semakin besar pula anggaran yang dapat dikeluarkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Dengan terus dilaksanakannya pembangunan daerah maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera dilihat dari nilai t-statistik $0.6725 > 0.05$.

Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Nur'ani (2015) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB.

Hal ini disebabkan karena pengelolaan anggaran pendapatan daerah belum disalurkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, komponen Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh pajak daerah hal ini membuktikan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Perhatikan Tabel berikut :

Tabel 4.8

Pendapatan Asli Daerah Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera

Tahun	Pajak	Retribusi	Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-Lain PAD Sah
2010	Rp 8,481,049,324,164.00	Rp 237,574,657,294.55	Rp 480,380,612,746.48	Rp 844,527,533,275.92
2011	Rp 10,798,938,203,396.70	Rp 122,293,428,539.42	Rp 724,893,153,030.41	Rp 1,046,107,641,431.52
2012	Rp 12,865,265,187,731.00	Rp 138,663,991,383.64	Rp 723,524,543,495.56	Rp 1,243,343,560,526.27
2013	Rp 13,712,172,245,490.30	Rp 213,923,569,594.06	Rp 810,387,059,662.04	Rp 1,257,923,443,939.46
2014	Rp 15,895,389,379,338.00	Rp 164,236,134,852.06	Rp 659,477,645,127.38	Rp 2,284,880,234,852.71
2015	Rp 17,694,792,073,456.30	Rp 138,508,041,649.00	Rp 840,910,639,824.02	Rp 2,593,450,315,697.65
2016	Rp 18,961,771,343,161.80	Rp 134,977,441,133.16	Rp 3,220,640,465,816.84	Rp 2,690,506,629,649.71

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih didominasi oleh pajak, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah sehingga dapat mnegurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap produktifitas PDRB seluruh Provinsi di pulau Sumatera

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat dari dana APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1999, alokasi DAU ke suatu daerah ditetapkan berdasarkan dua faktor, yaitu potensi perekonomian dan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah (*fiscal need*) dicerminkan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat

pendapatan masyarakat. Potensi perekonomian antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan pemerintah daerah (*fiscal capacity*), seperti dari hasil industri dan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB.

Dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan potensi di setiap daerah. Maka Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan mampu mendorong perekonomian suatu daerah hingga meningkatkan produktifitas PDRB yang tinggi. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera.

Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dialokasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing provinsi di pulau Sumatera. Pengalokasian DAU ini berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah mengatur dan mengelola anggaran belanja daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Nur'ani (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap produktifitas PDRB.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap produktifitas PDRB seluruh Provinsi di pulau Sumatera

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah dalam bentuk pendapatan dalam APBD, selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana perimbangan lainnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diberikan kepada daerah untuk dipergunakan dalam pembiayaan program khusus yang merupakan prioritas nasional. Dana ini diharapkan dapat dikelola untuk percepatan pembangunan pada bidang-bidang atau sektor-sektor strategis untuk peningkatan infrastruktur, pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dengan dipergunakannya Dana Alokasi secara optimal maka diharapkan akan membantu masyarakat untuk memperoleh infrastruktur serta fasilitas-fasilitas pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh Provinsi di pulau Sumatera.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang digunakan untuk program khusus yang merupakan prioritas nasional. Berpengaruhnya DAK secara signifikan terhadap produktifitas PDRB menunjukkan bahwa program-

program khusus dari pemerintah pusat telah sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap produktifitas PDRB seluruh Provinsi di pulau Sumatera

Belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah adalah suatu tindakan pemerintah daerah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBD.

Diberikannya kewenangan fiskal kepada daerah otonom didasarkan atas prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga alokasi sumber daya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Belanja yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor akan membuat masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan daerahnya serta diharapkan meningkatkan produktifitas PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera. Ini ditunjukkan dari nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0139 lebih kecil dari 0.05.

Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirgahayu Lerengkum realisasi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat produktifitas PDRB.

Hasil ini disebabkan pengelolaan belanja daerah dirancang sudah efektif dan efisien untuk meningkatkan produktifitas PDRB.

H. Hasil Penelitian dalam Pandangan Islam

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.

Hasil penelitian yang menunjukkan kebijakan fiskal telah mampu mendorong produktifitas PDRB seluruh provinsi di pulau Sumatera memiliki makna bahwa kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah telah terbukti efektif dan efisien. Namun, kebijakan yang telah efektif dan efisien tersebut perlu terus ditingkatkan berkenaan dengan hal ini ekonomi islam memberikan saran yaitu dengan mengikuti ketentuan umum dan prinsip-prinsip yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist untuk memandu kebijakan fiskal.

Menurut Manan (Mannan, 1997: 230) prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu

masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Mannan melanjutkan, dari semua kitab agama masa dahulu, al-Qur'an-lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Dengan demikian kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip tauhid, rubbiyyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa) (Muslimin. 2005: 37-38).

Menurut Majid, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu: penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi (Majid. 2003: 191).